

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi dalam bernegara.. Dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat karena rakyat menentukan nasib mereka sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri utama negara demokrasi adalah melaksanakan suksesi kepemimpinan secara regular dengan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum yang secara khusus dimaksudkan untuk mengantarkan suksesi kekuasaan secara periodik, tertib dan adil. Pemilu yang mendapat legitimasi rakyat, dimana warga negara memiliki dan menggunakan hak pilih yang dilindungi oleh hukum.

Pemilu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilu legislatif dan 4 kali pemilihan presiden dan wakil presiden dari sejak

tahun 1955 hingga tahun 2019.¹ Pelaksanaan pemilu di Indonesia mencakup berbagai tingkatan pemilihan mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat pemilihan lokal daerah. Pemilihan yang dilakukan untuk berbagai pengisian jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden di tingkat pusat, Gubernur di tingkat provinsi, hingga pemilihan Kepala Desa di tingkat desa. Semua proses dalam mekanisme pergantian kekuasaan di berbagai tingkatan pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis, jujur dan adil.

Dalam demokrasi, warga negara dari berbagai tingkatan sosial, pendidikan dan ekonomi mempunyai hak suara yang sama dalam pemilu. Demokrasi memberikan peluang kepada warga negara untuk membentuk dan mengawal pemerintahan negara melalui proses pemilu sebagai ajang rotasi kekuasaan. Suara rakyat dalam pemilu menjadi penting bukan hanya menentukan siapa yang berkuasa tetapi juga apakah proses pemilihan yakni pemilu, pilpres dan berbagai tingkatan pemilu lainnya bisa berlangsung jujur dan adil sesuai dengan nilai – nilai demokrasi.

Partisipasi warga negara sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah hal yang sangat mendasar fundamental dalam proses demokrasi. Setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses politik di negara sendiri dan memilih calon pemimpin – pemimpin mereka, maka setiap warga negara juga mempunyai kewajiban berpartisipasi dan berusaha agar pemimpin –

¹ Sejarah Pemilu di Indonesia” <https://kab-tegal.kpu.go.id/sejarah-pemilu> (diakses pada tanggal 1 maret 2021, pukul 19.30)

pemimpin terbaik yang terpilih Penerapan asas demokrasi di Indonesia membuka seluas – luasnya kepada warga negara dari berbagai latar belakang pekerjaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu atau menjadi kandidat calon langsung kepala daerah di ajang pemilu. .

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, peran militer selalu hadir dalam kehidupan sosial – politik di Indonesia meskipun dengan wajah dan peran yang berbeda – berda. Dari beberapa era demokrasi presiden Soekarno hingga presiden Joko Widodo, keterlibatan militer sudah terjadi sejak Pemilu pertama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1955. Pada saat itu militer mempunyai hak memilih dan dipilih, tetapi militer tidak mendapat jatah lursi di parlemen. Tahun 1954 Koloner Angkatan darat A.H nasution mendirikan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) sebagai “organisasi garis depan” para tentara. IPKI pada saat itu mengincar pemilih dari golongan militer aktif..²

Pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, tahun 1971 IPKI kalah bersaing dengan partai militer tandingan Golkar . Golkar turut andil sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto. Kemudian munculnya kebijakan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di era Orde Baru ini militer leluasa melakukan Intervensi terhadap proses pemilu. Intervensi yang dilakukan militer saat itu memecah belah partai pesaing Golkar lewat operasi

² Petrik Matanasi, “Sejarah Pemilu 1955”, Tirta, 17 April 2019, <https://tirta.id/sejarah-pemilu-1955-tentara-punya-hak-pilih-banyak-mencoblos-pki>

Intelijen. Sedangkan, kelompok masyarakat yang tidak memilih Golkar juga mendapat intimidasi dengan ancaman kekerasan.

Setelah Era Orde Baru, peran militer dalam pemilu mengalami pasang surut. Dalam kurun satu dekade pertama reformasi dari tahun 2000 sampai 2010 militer mengambil jarak dengan politik praktis, termasuk pemilu. Dekade berikutnya reformasi tahun 2010 sampai 2020 segelintir perwira tergoda “kembali” masuk ke kehidupan politik nasional. Para perwira militer mengikuti berbagai kancah pemilu di tingkat nasional hingga daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah calon bupati, gubernur dan presiden yang berlatar belakang militer. Tahun 2015 ada 4 calon kepala daerah dan 1 calon wakil kepala daerah yang merupakan anggota TNI aktif. Pada pagelaran Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 muncul nama putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Agus Harimurti yang juga memiliki riwayat karir kemiliteran. Pada tahun 2018 ada 3 nama calon berlatar belakang militer dalam pemilihan gubernur di tahun 2018 diantaranya Mantan Pangkostrad Letjen Edy Rachmayadi untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara, Brigjen TNI Edy Nasution untuk pemilihan gubernur Riau, dan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat.³

Setelah era reformasi, dalam kontestasi Pemilihan Presiden & Wakil Presiden sering muncul figur calon Presiden ataupun Wakil Presiden yang memiliki latar belakang militer. Figur mantan Panglima TNI seperti Prabowo

³ Pilkada 2018 dan Jalan Para Perwira menuju pemilu 2019”, Kumparan, 18 Januari 2018.
<https://kumparan.com/kumparannews/pilkada-2018-dan-jalan-para-perwira-menuju-pemilu-2019/>

Subianto, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi setelah era reformasi citra yang melekat dalam calon – calon kepala daerah atau lainnya berbeda dengan citra militer pada Orde Baru. Pada Orde Baru militer dalam yang masuk dalam pemerintahan atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah

Fenomena keikutsertaan calon berlatar belakang militer selalu menghiasi berbagai ajang kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di Pemilihan tingkat nasional Pemilihan Presiden tetapi sampai ke pemilihan tingkat kabupaten/ kota yang paling dasar yaitu Pemilihan Kepala Desa atau biasa disebut Plkades.

Pada tahun 2019 di Kabupaten Pati telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau biasa disebut Pilkades Serentak. Ajang Pilkades Serentak yang diselenggarakan 21 Desember 2019 di Kabupaten Pati diikuti sebanyak 122 desa dari 406 desa/kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan.⁴ Pilkades Serentak yang diselenggarakan di tahun 2019 tersebut tidak hanya diikuti oleh masyarakat sipil yang mendaftarkan diri tapi diwarnai dengan keikutsertaan 4 calon kepala desa dengan latar belakang TNI militer dalam 4 desa berbeda di Kabupaten Pati. Dari 4 calon kepala desa dengan latar belakang TNI , 3 calon Kepala Desa berhasil menjadi Kepala Desa terpilih dan 1 calon gagal menjadi Kepala Desa terpilih di desa tempat pemilihannya. Total suara dan pangkat jabatan TNI dari masing – masing calon Kepala Desa berlatar belakang TNI sebagai berikut

⁴ Hasil Pilkades di Kabupaten Pati 2019”, Patinews, 28 Desember 2019 <https://www.patinews.com/hasil-pilkades-di-kabupaten-pati-2019/>

Tabel 1.1

Total Perolehan Suara Calon – Calon Kepala Desa Latar Belakang TNI Militer

No.	Nama & Pangkat	Jabatan	Desa	Total Suara
1.	Pelda Mulyono	Danpoksansus Unit Intel Kodim 0718/Pati	Desa Payang Kec. Pati	250
2.	Sertu Sudiman	Babinsa Ramil 20/Tambakromo	Desa Banjarsari Kecamatan Gabus	748
3.	Koptu Slamet	Babinsa Ramil 20/Tambakromo Kodim 0718/Pati Rem 073/Mkt	Desa Karangwono Kecamatan Tambakromo	1583
4.	Serma Sudiyono	Baminhub Timhub Denma Rem 072/Pmk	Angkatan Lor Kecamatan Tambakromo	1304

Sumber : Data dari Desa yang sudah diolah

4 Nama calon Kepala Desa dalam tabel diatas merupakan anggota TNI berstatus aktif belum purnawirawan sebelum mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa. Menurut Undang – Undang no. 34 tahun 2004 tentang TNI yang berisi bahwa TNI memiliki tugas dan wewenang sebagai alat negara bidang pertahanan. Pasal 39 Undang – Undang No.34 tahun 2004 menyebutkan jika anggota TNI dilarang jadi anggota partai politik, melakukan kegiatan politik praktis , mencalonkan jadi anggota

legislatif dan bisnis. Akan tetapi dalam lingkup Pilkades , TNI diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kandidat calon Kepala Desa. Anggota TNI tersebut bisa mengikuti Pilkades dengan syarat harus mengajukan cuti dari dinas aktif untuk menjadi bakal calon Kepala Desa .

Berdasarkan hal tersebut selaku komandan Kodim memberi izin , merestui atau tidaknya anggota TNI yang menghadap untuk menjadi bakal calon (balon) Kepala Desa. Apabila kontestan calon Kepala Desa anggota TNI diizinkan oleh Komandan atau atasannya dan terpilih menjadi Kepala Desa dalam ajang Pilkades, anggota TNI yang terpilih tersebut wajib mengajukan pensiun dini. Apabila kandidat tidak terpilih menjadi Kepala Desa, anggota TNI tersebut bisa melanjutkan pengabdian sebagai seorang TNI. Regulasi Pilkades berbeda dengan dengan pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Legislatif. Khusus Pilkades, anggota TNI aktif boleh ikut mencalonkan diri tanpa harus mundur dari jabatannya selama proses pencalonan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak tidak satupun mengatur mengenai boleh tidaknya anggota TNI aktif untuk ikut dalam suksesi/pemilihan Kepala Desa. adanya ruang bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan syarat lain untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ke dalam Peraturan Daerah.

Lembaga Survei Segitiga institute merilis tren kepemimpinan pada tahun 2016, hasil survei menyatakan bahwa sebesar 40,5 % masyarakat Indonesia mengidamkan pemimpin yang berasal dari kalangan militer.⁵ Hal itu dinyatakan spesifik berupa periode kepemimpinan nasional 2014 – 2019. Angka itu jauh lebih besar dibanding responden yang menyatakan lebih cocok dengan kepemimpinan sipil, yaitu sebesar 21.4 %. Hal lain dari survei ini adalah sepiunya oknum militer yang terjerat pidana kasus korupsi, perkara yang paling dibenci masyarakat ditambah hal – hal yang berkaitan fisik dan kesan tegas, gagah, serta rapi dalam hal kemiliteran.

Akademisi Militer Amerika Serikat Tom Kolditz dalam tulisannya *Why Military Produces Great Leaders* mengatakan Persepsi kepemimpinan dari militer , militer dididik dalam etos kedisiplinan, memenuhi tugas, tanggung jawab yang tinggi. Yang paling penting kepemimpinan militer berdasar konsep kewajiban, pelayanan dan pengorbanan diri karena telah mengambil sumpah. Kualitas kepemimpinan militer terbentuk dari pelatihan progresif dan sangat terstruktur, terdidik, dan berpengalaman. Lebih jauh lagi pelatihan militer memakan waktu yang lebih lama dan anggaran lebih mahal dari pelatihan sejenis di bidang industri atau institusi pemerintahan.

⁵ “Plus-Minus Politik Militeristik” medcom 20 januari 2018
<https://m.medcom.id/amp/GbmJ1G3k-plus-minus-politik-militeristik>

Masyarakat dalam memilih calon pemimpin memiliki alasan tersendiri dalam pilihannya. Pilihan yang bisa didasari karena pandangan politik, kharisma figur, program kerja, maupun karena money politik. Hal ini tidak lepas dengan modal yang dimiliki oleh peserta pilkada. Menurut Bordieu ada 4 bentuk primer jenis modal, yaitu

1. Modal Ekonomi (uang dan harta), yaitu modal yang berupa materi yang dapat digunakan sebagai dana operasional selama masa kampanye, pemilihan dan pasca pemilihan.
2. Modal budaya (budaya barang dan jasa, termasuk mandate pendidikan) Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seni, pendidikan dan bentuk-bentuk Bahasa.
3. Modal sosial (kenalan dan jaringan). Modal sosial adalah jumlah sumber daya, actual dan virtual, yang diperoleh dengan individu atau kelompok berdasarkan tanah lama memiliki jaringan atau hubungan dilembagakan lebih atau kurang dari kenalan bersama dan pengakuan. Modal ini juga dapat diartikan sebagai mesin politik/partai pendukung
4. Modal simbolik (legitimasi) modal simbolik adalah suatu bentuk modal ekonomi fiskal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan menghasilkan efeknya yang tepat

Status sosial, pendidikan bahkan jabatan dalam Agama tertentu merupakan senjata yang cukup kuat untuk mendapatkan dukungan pemilih. Peranan status sosial seseorang berpengaruh dalam segi kehidupan sosial politik masyarakat

Indonesia. Sosok Militer dipandang memiliki nilai tambah tersendiri disbanding dengan calon berlatar belakang lain. Sosok militer yang memiliki *stereotype* figur yang berani dan tegas dalam mengambil tindakan atau keputusan. Modalitas dan figuritas TNI militer dalam ajang kontestasi menjadi hal yang cukup menarik untuk dilihat karena peran militer dalam kehidupan demokrasi Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dari era demokrasi terpimpin hingga tahun 2021 ini.

Dinamika sosial masyarakat dalam Pilkades calon – calon Kepala Desa memiliki suatu kekuasaan dalam hal latar belakang figur, pendidikan, keturunan dan ketokohan, Bagi masyarakat desa umumnya Pilkadss tidak hanya ajang pertarungan perebutan kekuasaan , Harga diri, kehormatan dan simbol sosial karena kekalahan dalam pilkades Tulisan ini memfokuskan pada keikutsertaan beberapa mantan anggota TNI dalam ajang kontestasi pilkades serentak Kabupaten Pati tahun 2019, tulisan ini menekankan pada bagaimana potret fenomena para mantan anggota TNI Militer dengan pengelolaan modalnya berhasil meraih kemenangan sebagai kandidat paling potensial di ajang pemilihan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana potret fenomena keterpilihan calon berlatarbelakang militer masuk kedalam kontestasi pencalonan Kepala Desa pada pilkades 2019
- b. Bagaimana modalitas calon Kepala Desa berlatar belakang TNI Militer pada Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Pati

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Mengetahui fenomena Militer masuk dalam kontestasi ajang pemilihan Kepala Desa

b. Mengetahui dampak figuritas dan modalitas calon Kepala Desa berlatar belakang TNI Militer pada Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Pati

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmu politik dan pemerintahan khususnya tentang Pemilu Kepala Desa di Indonesia, utamanya dalam fenomena yang terjadi dalam Pilkades. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baru mengenai modalitas dan figuritas TNI militer dalam ajang Pilkades Serentak .

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai fenomena yang terjadi di Pilkades Serentak Kabupaten Pati. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai

kontribusi untuk meningkatkan strategi dan menambah ilmu bagi calon – calon kepala desa yang akan maju dalam ajang kontestasi

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Modalitas

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Didalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilu sudah secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang

digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Di dalam proses pemilihan umum sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pemilu adalah manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilu adalah langsung, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dalam menetapkan strategi kemenangan pemilihan umum tidak hanya menyesuaikan kondisi pemilu itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga termasuk modalitas kandidat baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan kemenangan, karena itu modalitas yang harus dimiliki kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yaitu tidak hanya modal sosial kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi.

Dalam penelitian ini merupakan fokus pada teori modal politik, modal sosial dan modal ekonomi sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan

mendalam. Modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor- aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pilkades.

1.5.1 Modal Politik

Modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.⁶

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik

⁶ Sudirman Nasir, SBY antara modal politik dan modal simbolik, dalam <http://pemilu.liputan6.com/kolom>, tanggal 29 September 2015, pukul 16.00 wib

atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

1.5.2. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan¹². Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan

pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut

- a. Robert Putnam : modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan
- Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*),

norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan).

- b. Pierre Bourdieu , mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).
- c. James Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi

informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi public

Sementara bahasan mengenai trust jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebijakan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan *zero trust society*, ketiadaan kepercayaan. Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia

bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.

Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung

1.5.3 Modal Ekonomi

Dalam pemilu tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (*capital*) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (*financial capital*). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan.

Dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilihan ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal inilah yang membuat kandidat dan proses pilkada mengakibatkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan cost politik lainnya oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan berdasarkan penggunaannya dan besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas kandidat.

Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan

penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk kemenangan pilkada.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Melihat faktor apa saja yang menjadikan calon kepala desa berlatarbelakang militer menjadi pemenang dalam Pilkades Serentak Kabupaten Pati 2019, maka peneliti menggambarkan dengan berawal dari konstentasi yang memberikan tiket menuju Pilkada. Setelah kandidat peneliti memfokuskan penelitian dengan mencari faktor figuritas melalui teori kepemimpinan dan teori ketokohan apa yang menjadi daya tarik masyarakat terhadap calon berlatar belakang militer sehingga mau untuk memilihnya. Ditambah dengan modalitas yang dimiliki keduanya, dimana didalamnya termasuk modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Dari faktor-faktor ketokohan atau figuritas dan modalitas.

Adapun operasionalisasi dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Modal Politik

- a. Kepemilikan jabatan politis
- b. Adanya dukungan dari parpol tertentu
- c. Adanya tim sukses yang solid

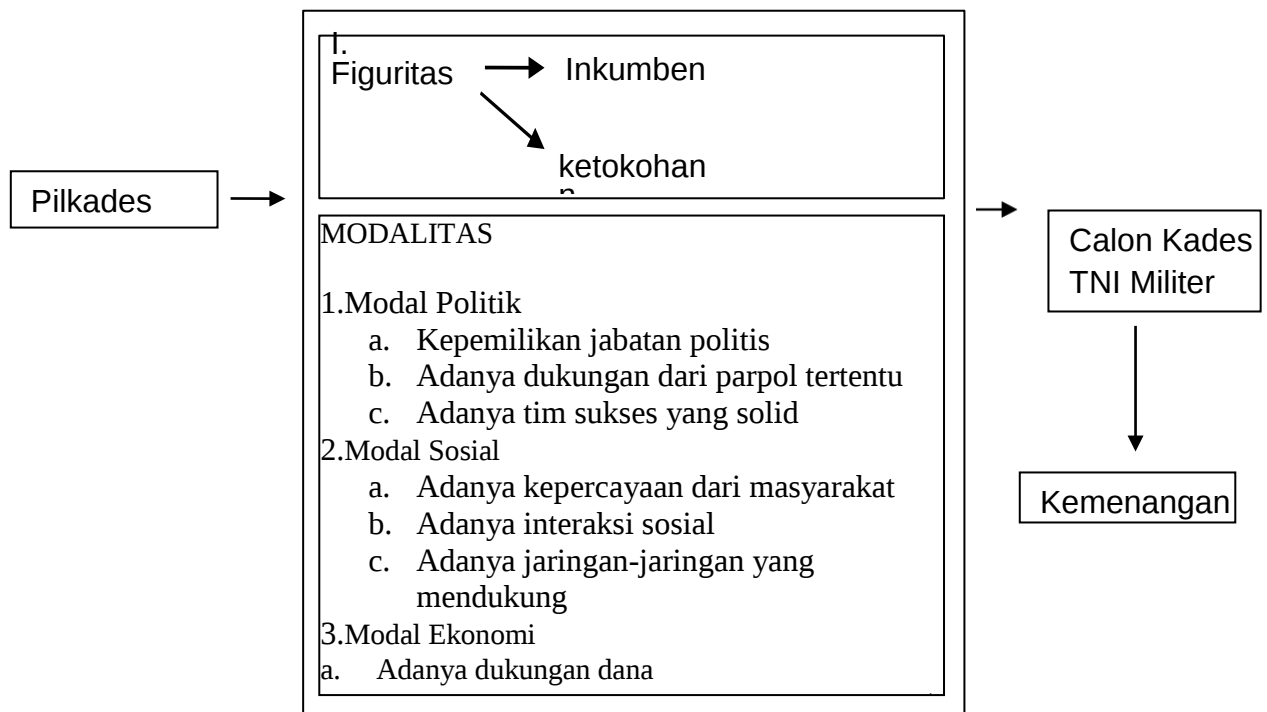
2. Modalitas Sosial

- a. Adanya kepercayaan dari masyarakat
- b. Adanya interaksi sosial
- c. Adanya jaringan-jaringan yang mendukung

3. Modal Ekonomi

- a. Adanya dukungan dana
- b. Adanya kepemilikan alat produksi (perusahaan)

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting , seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum dan menafsirkan makna data.⁷

Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin menggali secara mendalam mengenai dinamika konflik tenurial pendudukan kawasan hutan untuk permukiman di hutan Regaloh Kabupaten Pati. Peneliti mencoba mengumpulkan data agar fenomena mengenai fenomena keterpilihan calon Kepala Desa berlatarbelakang Militer pada Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Pati.

1.7.4. Penentuan Informan

Yang dimaksud informan dalam penelitian ini ialah orang atau pelaku yang benar – benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor – faktor kontekstual, jadi lebih memudahkan untuk menjaring sampling sebanyak – banyaknya dari berbagai sumber. Dan fungsi lain dari informan adalah menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

⁷ Creswell John.W. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm 4

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asumsi pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini subjek penelitian itu sendiri adalah Serma Sudiyono, Sertu Sudiman, Koptu Slamet . Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan diambil dengan metode pengambilan sampel berdasarkan tujuan (*purposive sampling*), yaitu diserahkan pada pertimbangan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil dan memilih orang – orang yang terpilih oleh peneliti. *Purposive sampling* dilakukan dengan wawancara yang mendalam mengenai fenomena keterpilihan kepala desa berlatarbelakang TNI Militer pada Pilkades Serentak Pati tahun 2019.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan dilakukan dilokasi sumber *Key Informan* (informan kunci) berada, dalam hal ini *key informan* yang dimaksud adalah Serma Sudiyono di desa Angkatan Lor Kec. Tambakromo, Koptu Selamat Desa Karangwono Kec. Tambakromo, Sertu Sudiman Desa Banjarsari Kec. Gabus

1.7.3. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menyelidiki dan memahami secara empiris faktor apa saja yang melatarbelakangi

Fenomena calon kepala desa berlatarbelakang TNI Militer pada Pilkades Serentak Pati tahun 2019. Dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

1.7.5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai

b. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi penelitian yaitu berupa pengambilan foto dan surat – surat lainnya yang dianggap membantu dalam menunjang pada saat penelitian dilakukan.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu informasi yang diperoleh secara tertulis maupun lisan dan dipelajari sesuatu yang utuh. Dalam analisa kualitatif, terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu :

a. Menekankan sumber data, yang dimulai dengan keseleruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.

b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan hasil penelitian dari lapangan, baik primer maupun data sekunder. Dengan melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya, dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan teori yang ada.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, hal ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisa kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

1.7.7. Kualitas Data

Untuk memperoleh hasil yang berkualitas peneliti menggunakan serangkaian proses validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data dinyatakan valid apabila data yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas data dalam penelitian ini dicapai dengan melakukan triangulasi data memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu, untuk pengecekan atau pembandingan data.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan

memanfaatkan sumber yang digunakan sebagai pembanding dari data yang diperoleh di lapangan.. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
- 2) Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
- 3) Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.

